

ISTINBAT PROGRESIF
(Telaah Progresifitas Makna sebagai metode Istinbat Hukum
Kontemporer)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman



Oleh:

ZAINUL ARIFIN
NIM. F02212017

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Zainul Arifin

NIM : F0.22.120.17

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2016

ya yang menyatakan,

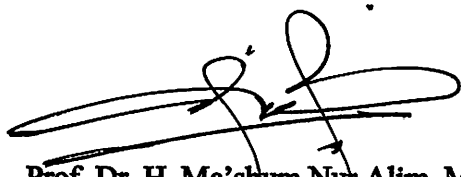
Zainul Arifin



PERSETUJUAN

Tesis Zainul Arifin ini telah disetujui
pada tanggal, 29 Juli 2016

Oleh
Pembimbing

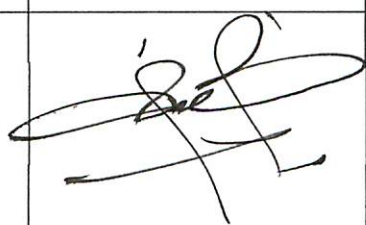
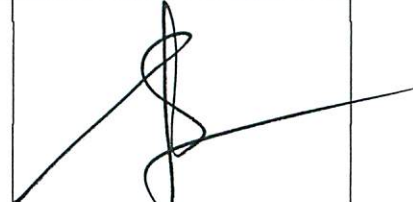



Prof. Dr. H. Ma'shum Nur Alim, M.Ag.
NIP. 196009141989031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Zainul Arifin ini telah diuji
pada tanggal, 29 Agustus 2016

Tim Penguji:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ma'shum Nur Alim, M.Ag	(Ketua)	
2.	Dr. Khoirul Yahya, M.Si	(Sekretaris/ Penguji)	
3.	Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, SH, MH	(Penguji)	

Surabaya, 29 Agustus 2016

Direktur Program Pascasarjana




Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag.
NIP. 195601031985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZAINUL ARIFIN
NIM : F02212017
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA / SHARI'AH
E-mail address : a2zaunu2009@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Istibat progresif (Telah Progresifnya
Maka Dalam Ketentuan Hukum Poligami
dan Mahar Mithil

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2016

Penulis

(Zainul Arifin
nama terang dan tanda tangan)

Oleh karena itu, untuk menuju pemikiran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, (situasi dan kondisi) yang dihadapi umat Islam dewasa ini, yang perlu ditanamkan adalah kesadaran *tadabbur* terhadap Al-Qur'a>n, kesadaran ini dimaksudkan untuk menghilangkan dogmatisme, pengsakralan tradisi dan pengulangan tanpa ada sikap kritis dan sebagainya.

Tinjauan kritis dan historis studi Al-Qur'a>n ini akhirnya harus memungkinkan terciptanya suatu kesadaran baru dari perspektif kritis dan praktis, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Karena itu, adalah menjadi sebuah keniscayaan bagi komunitas muslim dewasa ini yang hidup di tengah-tengah era kemodernan karena keterbelahan budaya dan mandulnya pemikiran kritis untuk selalu mengadakan pembaharuan dalam pemikiran.

Sebagai usaha untuk menghidupkan pembaharuan dan pola pikir rasionalitas tersebut, harus senantiasa berjalan beriring dan mengontrol kemodernan yang tentu saja dengan membuat perubahan-perubahan yang spektakuler. Untuk menaggulangi itu, paling tidak bagaimana bisa meyuguhkan produk-produk hukum melalui pisau analisis *istinbat}}* progresif dengan menciptakan iklim kesadaran dengan sikap kritis dan terutama dalam melihat warisan pemikiran Islam masa silam agar semangat kesadaran pemikiran Islam yang hendak dibangun kembali dapat dicerna dengan baik dan *thinkable (ma'qu>l)*.

Perenungan *Istinbat}}* progresif; dalam ketentuan hukum terhadap poligami dan mahar mithil, dalam penelitian ini, berangkat dari kajian tentang teori *istinbat}}* yang ada, penulis melihat kajian itu hanyalah sebatas teoritis

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis perbandingan (*comparative study*), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis makna yang terkandung pada ide teks, kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep inferensi yang sudah ada, dari hasil perbandingan tersebut ditarik suatu kesimpulan (*dala>lah*) hukum Sehingga mempunyai keutuhan makna yang jelas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan inferensi teks. Tujuan menggunakan metode ini adalah sebagai metode *istidla>l* (menentukan legalitas dalil) dengan cara mengeluarkan dan menggali intertektualitas al-Qur'a>n hal ini dimaksudkan untuk melakukan suatu aktivitas yang konstuktif terhadap suatu obyek kajian teks yang mempunyai makna normatif-interpretatif, dengan metode ini akan menghasilkan suatu makna yang obyektif

Dengan demikian, wilayah kajian ini akan membahas permasalahan-permasalahan dari aspek ontologi (Normativitas Teks), epistemologi (teori Istinbat Progresif), dan pada wilayah aksiologi, yang dalam hal ini pada wilayah hasil dari *dala>lah lafz}iyyah* (petunjuk teks) yang dijadikan sebagai referensi *masadir al-akhlakam* dan implikasi teoritisnya bernilai pada perkembangan pemikiran dalam menjawab problematika hukum kekinian.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter. Maksudnya adalah pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang berupa

Tafsir dan takwil. Kaidah ushuliah kaidah lughawiah kaidah tafsiriah dan relasi teks dan makna yang digunakan sebagai alat bantu untuk menggali intertektualitas dari ayat al-Qur'a>n terutama yang berkaitan dengan *dala>lah al-H}ukm*,

Bab kelima, bab ini adalah implikasi teoritik dari metode *istinbat}* progresif yang didiskripsikan dalam bentuk contoh ayat al-Qur'a>n yang dijadikan sample pada teori tersebut.

Bab keenam, merupakan bab terakhir; bab yang memaparkan dua hal. Pertama, kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas rumusan masalah Kedua, saran pemanfaatan, 1) saran untuk keperluan pemanfaatan produk, 2) saran untuk diseminasi produk ke sasaran yang lebih luas, dan 3) saran untuk keperluan pengembangan lebih lanjut, khususnya untuk bagi pemerhati studi al-Qur'a>n pada umumnya.

yang sebenarnya dalam sumber otoritatif kesempurnaannya telah dijamin oleh Allah melalui teks al-Qur'a>n yang disinyalir telah sempurna.¹³ Jaminan kesempurnaan tanpa syarat karena otoritasnya langsung dari Allah¹⁴ dan bagi para ilmuwan yang haus akan pengetahuan, kajian tentang keilmuan yang bersumber dari al-Qur'a>n akan sangat menarik terutama yang berkaitan dengan sumber hukum Islam akan menjadi

¹² Mengutip pendapat wahab khallaf, secara garis besar variable yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang terdapat pada kalam Allah terdiri dari tiga perkara; 1). *Al-Ah}ka>m al-I'tiqa>diyyah* yakni perbuatan hukum yang berhubungan dengan teologi dengan enam pokok sendi keimanan, 2). *Al-Ah}ka>m al-Khuluqiyyah*, perbuatan hukum yang berkaitan dengan tingkah laku artinya perbuatan yang mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan menjahui segala bentuk etika yang tidak bermoral. 3). *Al-Ah}ka>m al-'Amaliyyah*, kegiatan manusia yang berhubungan dengan ranah hukum dan inilah dalam terminology abdul wahhab khallaf disebut dengan al-Fiqh al-Qur'a>n, dari kategori yang terahir ini dipetakan lagi menjadi dua bagian yakni: *Al-Ah}ka>m al-'Ibadah dan Al-Ah}ka>m al-Mu'a>mah* yang terbagi lagi menjadi tujuh bagian; (1) *Akhka>m ah}wal al-Shahs}iyyah (hukum keluarga)*, (2) *Al-Ah}ka>m Mudniyyah* (hukum yang berkaitan dengan transaksi hutang piutang), (3) *Al-Ah}ka>m al-Jinaiyyah* (hukum-hukum yang berkaitan dengan delik perkara pidana). (4) *Al-Ah}ka>m al-Mura>fa'a* (hukum yang berkaitan dengan peradilan). (5) *Al-Ah}ka>m al-Dusturiyyah* (hukum yang berkaitan dengan legalitas undang-undang hukum). (6) *Al-Ah}ka>m al-Dawliyyah* (hukum-hukum yang berkaitan dengan wilayah teritorial) dan (7) *Al-Ah}ka>m al-Iqtis}a>diyyah wa maliyyah* (hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan kebijakan moneter), untuk lebih jelasnya lihat *Us}ul Fiqh Wahhab Khallaf* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2002), 32

¹³ Diktum akhir ayat Allah memberikan sinyal ayat yang amat jelas, "Hari ini Aku sempurnakan agamamu, dan aku sempurnakan nikmatKu dan Aku ridha Islam sebagai agama yang paripurna". Menurut analisa penulis kata "*akmaltu*" adalah kesempurnaan sha>ri'at yang utuh dan sudah menjadi dan kata-kata *atmamtu* adalah kesempurnaan sha>ri'at yang perlu proses dan menjadi otoritas manusia untuk menyempurnakannya statemen ini adalah implementasi dari pemaknaan QS. Al-ma>idah (5): 3.

¹⁴ *إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ* "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'a>n, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya", QS. Al-Hijr (15): 9, Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Qur'a>n selama-lamanya, argumentasi ini didasarkan pada pendapat ulama diantaranya; Qata>dah berpendapat, "bahwa tidak mungkin keaslian dan kesucian al-Qur'a>n akan tergantikan oleh campurtangan iblis atau orang-orang yang tidak bertanggungjawab (orang kafir), menurut Bagha>wi, ia merupakan mu'jizat terbesar yang menunjukkan kebenaran risalah Muhammad Saw, yang dijaga Allah kesuciannya dari manipulasi, perubahan, pergantian maupun pertentangan isi dalam redaksi al-Qur'a>n. dan masih banyak lagi argument yang mendukung tentang orsinilitasnya dari berbagai aspek, lebih detail bisa lihat pada *Mukhtas}ar Tafsi>r al-Baghawi*, Vol.8, 126, *Tafsi>r al-Hawa>riy iya>d}I*, III, 335, bandingkan dengan al-S{an'a>ni, *Tafsi>r al-Qur'a>n li 'abdi al-Razzaq*, II, 404, *Tafsi>r ma'ani al-Qur'a>n*, IV,11/VI, 276, As'ad Hu>mad, *Aisar al-Tafasi>r* , I,4139, *Tafsi>r al-Muyassar*, IV,313

Artinya Hukum Islam yang merupakan manifestasi dari penerapan hukum (*istinbat*) *al-ahka*m) yang bersifat praktis-aplikatif. Sebelum ditransformasikan sebagai *law in action*, ada prasyarat mutlak yang dipenuhi ketika hendak menderivasi teks tersebut, dengan melihat ranah (ruang lingkup) dari normativitas teks yang akan dijadikan sebagai *thuruq al-istinbat*) (metodologi penerapan hukum).

Imam al-Ghazali telah membatasi ranah yang bisa dimasuki ijtihad dan *istinbat*) hanya pada setiap hukum syara' yang tidak ditemukan kejelasan dalilnya (baik dari al-Qur'a>n ataupun al-Sunnah)

yang *faqih al-nafs*, yaitu orang yang mempunyai kemampuan dalam menyimpulkan hukum-hukum fiqih dari dalil-dalilnya, b). *Al- al- al-shuru>t} al-kha>s}jah}* atau *al-shuru>t} al-tah}li>liyyah* (syarat-syarat khusus atau terperinci) syarat ini dilihat dari keahlian, (1) mengetahui dan menguasai arti ayat-ayat al-Qur'a>n, khususnya tentang ayat-ayat hukum, baik menurut bahasa maupun syari'ah. (2) mengetahui dan menguasai hadits-hadits nabi SAW., khususnya hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum, baik menurut bahasa maupun syari'ah. (3) mengetahui bahasa arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya. (4) mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma'. (5) mengetahui ilmu ushul fiqih. (6) mengetahui *maqa>s}jid al-shari<'ah* secara umum (7) mengetahui kondisi masyarakat dan kehidupan atau lingkungan. (8) mempunyai jiwa adil dan taqwa. c). *al-shuru>t} al-takmi>liyyah* (syarat-syarat penyempurna); (1) mengetahui peniadaan yang mendasar, yaitu seorang mujtahid mengetahui bahwa yang mendasar itu adalah meniadakan bahwa ia tidak berhukum kecuali apa yang telah digariskan oleh *syara'*, . (2) Memahami *maqa>s}jid al-shari<'ah* (tujuan-tujuan syari'at). (3) Mengetahui kaidah-kaidah kulliyah.). Dan yang dimaksud dengan kaidah kulliyah adalah kaidah-kaidah *al-kulliyah al-fiqhiyyah*, seperti "*al-dhararu yuza>lu*" (bahaya itu akan hilang) atau *al-yaqi>n la yazu>lu bi al-shak* (keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan). (4) mengetahui tempat-tempat perselisihan. (5) Mengetahui '*urf* (adat kebiasaan) yang berjalan di suatu negeri. (6) Mengetahui *manti>q* (logika), (7) keadilan dan keshalihan mujtahid. (8) Mempunyai sejarah dan pengalaman yang baik (tidak cacat). (9) mempunyai sifat *wara'* (taqwa) dan '*iffah* (karisma) (10) Mempunyai ketenangan dalam berpikir, kebijakan dalam menjelaskan dan hati-hati dalam berfatwa. (11) Perasaan rendah diri di hadapan Allah dengan selalu berdo'a kepada-Nya. (12) Ke-*thiqahan* dirinya dalam keahliannya dan pengakuan masyarakat terhadapnya.. (13) Kesesuaian amal seorang mujtahid dengan ucapannya dan ilmunya. untuk melihata kelengkapan referenya bias lihat; Saifuddin Abu al-Hasan 'Ali ibn Abi ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihka>m*, 198, Ala' al-Di>n Abi> al-H{asan 'Ali> ibn Sulaima>n al-Marda>wi> al-Hambali>, *Al-Tahbi>r Sharh}*, 3870, Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi> al-Shari>'ah al-Isla>miyyah*, 15-49, Al-Imam Abu> Ha>mid Muhammad ibn Muhammad al-Ghaza>li>, *al-Mustashfa>*, 351, Al-Syatiby, *Al-Muwafa>qa>t*, jilid 2, 2-5 dan jilid 4, 161, Na>diyah Syari>f al-'Umri>, *Al-Ijtihad Fi> al-Isla>m*, hal. 104, Al-Qara>fi>, *al-Ahka>m fi< Tamyi>z al-Fata>wa> 'an al-Ahka>m*, 249, Na>diyah Syari>f al-'Umri>, *Al-Ijtihad fi< al-Isla>m*, 105, Al-Imam al-Qara>fi>, *al-Furu>q*, al-Thab'ah al-U<la>, 1344 H, jilid 2. 110

الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأبي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله

“...Bahwa Rasūlullāh SAW. ketika hendak mengutus Mu’ādz ke Yaman bertanya: “ Dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya diajukan kepadamu suatu perkara? Mu’ādz menjawab: Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur’ ān). Nabi bertanya lagi: “ Bila engkau tidak mendapatkan hukumnya dalam Kitab Allah? Jawab Mu’ ādz: Dengan Sunnah Rasūlullāh SAW. Bila engkau tidak menemukan dalam Sunnah Rasūlullāh SAW. dan Kitab Allah? Mu’ādz menjawab: Saya akan menggunakan ijtihād dengan nalar (ra’yu) saya. Nabi bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasūlullāh SAW. dengan apa yang diridhai Rasu>lulla>h.”

Landasan berijtihad juga dapat ditemukan dalam riwayat yang menceritakan dua sahabat yang telah berijtihad ketika keduanya mengadakan perjalanan, dimana ketika itu waktu shalat sudah datang, namun keduanya tidak menemukan air. Kemudian keduanya shalat (dengan bertayamum), tidak lama kemudian setelah keduanya selesai melakukan shalat, keduanya menemukan air. Maka salah seorang mengulangi shalatnya. Sedang yang satu lagi tidak mengulanginya. Ketika hal itu diadukan kepada Rasulullah, beliau membenarkan keduanya, seraya beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: “Engkau sesuai dengan sunnah, dan shalatmu mendapat pahala.” Sedangkan kepada yang mengulangi shalatnya, ia berkata: “Bagimu dua pahala.”

mereformulasi konsepsi fiqh yang *up to date* yang akomodatif dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat modern.

Problematika hidup masyarakat memang makin beragam. Terhadap masalah yang berkenaan dengan hukum yang belum ada penetapan hukumnya, tidak ada jalan lain kecuali berijtihad. Ijtihad merupakan suatu tugas mulia sebagai upaya memberikan solusi alternatif dari berbagai masalah hukum yang makin kompleks.

Dalam ijtihad, teks al-Qur'a>n dan preseden (Sunnah) dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip yang umum dan dengan prinsip-prinsip tersebut lalu dapat dirumuskan menjadi aturan-aturan yang baru. Dimana mekanisme kerjanya meliputi pemahaman teks dan preseden dalam keutuhan konteksnya di masa lampau, pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang, dan pengubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks atau preseden. Reformulasi konsepsi ijtihad ini difungsikan sebagai upaya pembaruan hukum Islam, demikian juga sebagai upaya menjawab tantangan situasi baru dalam konteks hukum islam secara menyeluruh.

Ijtihad adalah satu-satunya cara untuk mengantisipasi perubahan sehingga nilai-nilai Islam dapat akomodatif dengan perkembangan masyarakat. Meskipun demikian, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*, dan *istis'ha>b* tetap ditempatkan dalam dua posisi yang berbeda. Di satu pihak, dalil hukum ini bersama Qur'an dan hadith sebagai sumber ijtihad, yang karenanya juga

hukum terhadap sebuah kasus yang spesifik diharapkan sebuah upaya ijtihad telah mencapai targetnya secara maksimal.

D. Implementasi Istinbat terhadap Pembinaan Hukum Islam

Kehidupan umat Islam di era global semakin kompleks mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, hingga formulasi hukum Islam kekinian yang tak kunjung selesai. Hal ini, karena berkembangnya tingkah laku perbuatan manusia seiring berkembangnya teknologi dan informatika. Dalam masalah politik misalnya, seperti yang terjadi di Indonesia khususnya, formulasi hukum Islam ke dalam hukum positif masih terbatas oleh pluralitas sosial yang tidak menghendaki terlegal formalkannya hukum Islam (baca; syari'at Islam) pada undang-undang, sehingga memicu banyaknya usulan berlakunya syari'at Islam di beberapa wilayah di bawah naungan otonomi daerah. Hal ini sangat difahami terkait beberapa undang-undang hukum positif yang masih belum bernuansa nilai-nilai islami. Oleh karenanya kajian *istinbat min al-'adilla al-ashiyah* (mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan hadith) sangat membantu dalam memformulasikan hukum yang komprehensif bagi masyarakat plural.

Implementasi dari realitas pemaknaan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah mencoba mengakomodir segala aktivitas manusia. upaya kontekstualisasinya banyak dilakukan oleh pemikir klasik maupun kontemporer. Namun demikian, upaya untuk menerjemahkan kembali nilai-

Sahabat, Tabi'in hingga sekarang, hukum Islam lahir untuk menjawab problematika masyarakat pada masanya.

Di sinilah letak nilai-nilai kemanusiaan hukum Islam (*The Humanism of Islamic Law*), semua selalu terbuka untuk mendapatkan sentuhan baru dalam penafsiran, bahkan terhadap ayat-ayat *khassah* dan *qath'iyah* sekalipun jangkauan proses penalaran (*Ijtihad*) harus tetap memberikan sentuhan tafsir, sebagai bukti dari adanya elastisitas al-Qur'an yang peka zaman dan juga bahwa Islam akan senantiasa mampu menciptakan sebuah solusi bagi problem masyarakat dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin hukum Islam akan dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer jika ruang untuk berijtihad terpasung oleh sumber hukum Islam yang ditulis beberapa abad yang lampau tanpa adanya proses reformasi, transformasi, inovasi maupun kontekstualisasi maksud *syari'* dengan kondisi sosial dimana problem masyarakat itu tumbuh dan berkembang sehingga dengan adanya proses diatas akan tercipta praktik hukum yang *established* (mapan).

Hukum Islam, dalam perangkat metodologi ulama' klasik merepresentasikan sebagai produk pemikiran (*ijtihad*) yang di dalamnya bersumber suatu hukum yang mengkoordinir aktivitas manusia (*'amaliyah*) dengan bukti-bukti yang komprehensif (*dalalah al-tafsiliyah*). Dengan ini, hukum Islam telah membatasi dirinya sebagai suatu hukum yang pasti dan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadith. Namun, benarkah hukum Islam telah merespons aspek-aspek mendasar dalam aktivitas manusia?

orang, melainkan orang-orang tertentu saja yang memiliki dan memenuhi kualifikasi. Istinbat} merupakan sebuah ekspresi maksimalisasi potensi akal proporsional dan rasionalisasi hukum dengan naungan wahyu yang terrefleksikan dalam worldview Islam. Kegiatan istinbat} adalah kegiatan yang niscaya keberlangsungannya dalam memfasilitasi terwujudnya hukum yang sesuai dengan pancaran wahyu, Al-Qur'a>n dan al-Sunnah, karena ia juga sebagai metodologi dan perangkat teoritik fiqih dalam menderivasi hukum dari sumber primer hukum, Al-Qur'a>n dan al-Sunnah. *Wallāhu a'lam.*



masalah-masalah hukum tersebut sangat bisa untuk direkonstruksi dan bahkan diganti dengan temuan-temuan pemikiran baru, dengan tetap berada dalam *hududullah* tersebut. Seperti potong tangan untuk pencuri cukup diganti dengan dipenjarakan.

Gagasan Shahrudin ini memang sangat menjanjikan lahirnya pemikiran-pemikiran tafsir yang *fresh*. Terutama dengan kegigihannya untuk melepaskan diri dari konteks sosio-historis masa lalu diturunkannya teks al-Qur'an dengan langsung masuk ke dalam teks-teks al-Qur'an selayaknya ia diturunkan dan disampaikan kepada kita hari ini.

Tetapi beberapa kritik yang cukup keras tertuju kepada Shahrudin. Utamanya berkaitan dengan (1) “gerakan meninggalkan *turats*” (tradisi pemikiran lama) dengan semata bertumpu pada keilmuan-keilmuan hari ini, yang tentu saja sikap negasi *turats* secara keseluruhan ini mengandaikan bahwa seluruh bangunan tradisi masa lalu sudah tidak sah lagi untuk diterapkan hari ini. (2) Terjadinya diskontinuitas terhadap hal-hal yang bersifat substantif yang dipercaya oleh mayoritas mufassir sebagai hal-hal yang seharusnya dijaga secara tetap (*tsabit*). (3) Metode hermeneutika *ta'wil* yang membidik ayat-ayat *mutasyabihat* berkecenderungan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai “legitimator” terhadap ilmu-ilmu pengetahuan kontemporer, dengan basis pembuktian rasional dan empirik, sehingga bila ada “teori rasional al-Qur'an” yang belum berhasil dibuktikan secara rasional dan empirik hari ini, maka ayat-ayat sejenis itu cenderung ditinggalkan.

Hal ini berbeda jauh dengan Rahman yang lebih akomodatif terhadap *turats* dan berhati-hati dalam kegiatan penafsirannya, terutama dalam penegasannya tentang pentingnya memahami tema ayat-ayat al-Qur'a>n secara holistik dan komprehensif.

C. Stagnasi Ijtihad dan Propabilitas Hukum yang Akut

Dalam sejarah, hukum Islam berkembang secara fluktuatif. Masa tashri>' hingga periode mazhab, hukum Islam mencapai puncak. Pada masa tersebut, universalitas ajaran Islam mampu diterjemahkan dalam konteks waktu dan keadaan. Sehingga ajaran Islam menjadi referensi primer merespon dinamika umat manusia yang terus maju. Dalam hitungan sejarawan, periode tersebut mulai dari masa Rasulullah SAW. hingga masa *tabi' tabi'un* (Abad 1 H. s/d. 4 H.).

Pada pertengahan abad ke-4 H. sampai akhir abad ke-13 H., Islam sebagai ajaran universal dan ber peradaban tidak terlihat lagi. Pada masa ini, Islam terlihat sebagai ajaran kuno dimana hukumnya tidak sesuai dengan peradaban manusia terkini. Kuno yang penulis maksudkan adalah, norma-norma dan kaidah dalam menggali hukum Islam masih didasarkan kepada teori zaman dahulu. Sedangkan di sisi lain *life style* manusia terus bergerak dan fenomena demikian merupakan *sunnatullah*. Untuk melogiskannya, penulis ungkapkan penjelasan Ilmu Manti>q yaitu, “ Alam berubah-berubah, dan setiap yang berubah adalah baharu, alam adalah baharu (dinamis) tidak statis.

Statisnya ajaran Islam karena sikap stagnasi umat Islam dalam memperkuat *tsaqafah* (intelektual) sebagai toponya *hadharah* (peradaban). Sikap ini terlihat dari perilaku umat Islam yang bertaqlid kepada mazhab yang telah ada. Mereka tidak berusaha lagi menyelesaikan prolemtika di masanya berdasarkan realitas yang ada. Nostalgia masa lalu dan anggapan telah mapannya mazhab yang dianut telah mengkristal dalam diri umat Islam dalam periode tersebut. Sehingga ajaran Islam hanyalah sebatas teori dan ritual saja bukan aplikatif sebagai hukum positif bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan.

Sering terdengar di telinga Hukum Islam digugat karena ditenggarai Islam sebagai agama normatif dan tradisional. Lambannya, perkembangan hukum Islam setelah masa kodifikasi²⁵ memposisikan ketertinggalan Islam jauh di belakang perkembangan peradaban manusia secara umum. Isu tertutupnya pintu ijtihad kian santer diwacanakan, hingga mendominasi selama berabad-abad, imbasnya umat Islam bergantung kepada referensi intelektual abad pertengahan yang dibarengi oleh ketidakmampuan berdialog dengan realitas yang senantiasa berkembang.

²⁵ Lihat bahasan Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Takwi>n al-'Aql al-'Araby* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah, 1989), terutama pada bab 11; baca pula Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997) 1-36. Menurut Hallaq (seorang guru besar hukum Islam McGill University), dominasi empat madhhab pada masa formatif ini disebabkan oleh kemampuan pendiri madhhab ini menawarkan sebuah tatanan yang jelas yang menggantikan sistem yang sebelumnya tidak tertata bagus. Pandangan semacam ini sebenarnya dibangun oleh Joseph Schacht dalam bukunya *An Introduction to Islamic Law* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1964. Pendapat inilah yang nantinya dikritik oleh Hallaq dalam disertasinya yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup.

Yusuf Qardawi dalam karyanya *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Indhibat wa al-Infiraath*, mengatakan, “bodoh seorang yang mengatakan bahwa buku-buku karya ulama terdahulu sudah cukup memadai untuk memberikan jawaban terhadap suatu persoalan baru. Karena, setiap zaman memiliki problematika tersendiri, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang senantiasa muncul dan berkembang yang tidak pernah terjadi pada masa yang lampau. Ada juga persoalan lama yang terjadi dan sifat yang dapat mengubah tabi'at, bentuk dan pengaruhnya. Sehingga hukum fatwa yang ditetapkan oleh ulama sudah tidak relevan lagi”.³⁵

Melihat argument di atas ijtihad senantiasa dibutuhkan disegala zamanya. Kebutuhan umat Islam terhadap ijtihad dapat dikatakan kebutuhan primer. Sebab adanya ijtihad akan memberikan ruang bagi hukum Islam lebih lentur dan lebih dinamis dengan keadaan sosial masyarakat yang selalu menuntut terjadinya perubahan dan perkembangan, baik dalam tatanan nilai maupun realitas sosial. Dewasa ini lonjakan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat signifikan, hal ini memberi ruang baru munculnya berbagai problematika yang tidak terjamah pada saat lahir dan berkembangnya imam madhab. Tentunya problematika ini cukup sulit jika dicari dari berbagai kitab-kitab karya ulama-ulama terdahulu, butuh formulasi fiqh baru dalam menjawab berbagai problematika yang terjadi dewasa ini.

³⁵ Yusuf Qardawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir baina Al-Indhibat wa al-Infiraath*, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 5

Kesimpulannya adanya diskursus tentang tertutupnya pintu ijtihad bukan lagi sebuah diskursus yang produktif jika hanya terhenti pada sebuah deskripsi mengenai kontroversi yang telah menjadi perdebatan sejak Abad Pertengahan. Hal yang semestinya menjadi sebuah renungan bersama adalah bahwa adanya diskursus ini merupakan tindakan preventif (pencegahan) di satu sisi, namun juga sebuah rangsangan atas keindahan diskursus masa silam mengenai beberapa perangkat metodologis yang malfungsi.

Sama seperti pada bagian tertentu, misalnya perangkat metodologi fikih, keberadaan materi usul fikih di beberapa lembaga pendidikan, misalnya di pesantren, kurang mendapatkan tempat aplikatif yang lebih luas. Hal ini disinyalir, sebagaimana argumen Abdul Mughits, adanya semacam larangan untuk menerapkan kaedah *usuliyah* dan *kulliyah* secara langsung dalam menjawab masalah *furu>'iyah*. Semestinya, penerapan dan pengembangan metodologi hukum Islam senantiasa mendapat angin bebas, sebeb masalah *furu>'iyah* yang bermunculan tanpa kompromi dan tak terbatas oleh waktu.⁵³

Jika hal ini dapat ditarik lebih lanjut, maka diskursus mengenai wacana penutupan ijtihad, dapat dengan penuh kesadaran menggagalkan tradisi yang, menurut Marshall G.S Hodgson tentang dialektika sebuah tradisi kultural⁵⁴, dapat berhenti untuk betul-betul hidup (*living*), dapat menurun menjadi transmisi semata. Artinya, ada sebuah pengembangan amanat bagi generasi

⁵³ Abdul Mughits, "Menyoal Faham *Insida>d Ba>b al-Ijtihad* di Pesantren" dalam Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Makalah Seminar Pengembangan Akademik Pondok Pesantren*, di The Sun Hotel, Sidoarjo, 18-20 Februari 2010.

⁵⁴ Marshall G.S Hodgson "The Venture of Islam; Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, Pent. Mulyadhi kartanegara (Jakarta: Paramadina, 2002), 112.

- b. Ulama Ash'ariyyah (Abi> al-Hasan al-Ash'ariy dan para pengikutnya) adalah salah satu ulama yang berpendapat bahwa akal tidak mungkin dapat menentukan baik-buruk dan benar-salah, serta kewajiban untuk menjalankan sesuatu yang baik dan menjauhi sesuatu yang buruk.

Menurut mereka, baik-buruk dan benar-salah yang berkaitan dengan perbuatan hamba yang dewasa hanya dapat diketahui melalui media Rasul-Rasul dan kitab-kitabNya. Maka, bagi masyarakat yang belum menerima ajakan untuk menjalankan agama Allah melalui Rasul dan kitabNya, tidak terkena beban (*taklif*) untuk menjalankan syari'at; karena akal tidak akan mampu menentukan benar-salah, baik-buruk. Atau dengan kata lain akal tidak dapat dipercaya sama sekali untuk menjadi sumber hukum.

- c. Ketiga, ulama Maturidiyah (Abu> Mans}u>r al-Maturidiy dan para pengikutnya) adalah ulama yang bersikap akomodatif dan mencoba mengakomodir (*al-Jam'u*) serta mencari jalan tengah antara pendapat Mu'tazilah dan Ash'ariyyah.

Di satu sisi, ulama Maturidiyah berpendapat bahwa akal dapat mengetahui benar-salah, dan baik-buruk. Sedangkan disisi lain, mereka berpendapat bahwa sesuatu yang benar dan baik (atau salah dan buruk) harus sesuai menurut Allah; karena akal manusia itu kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. Dan kewajiban menjalankan sesuatu yang baik serta menjauhi sesuatu yang buruk, hanya dapat diketahui melalui Rasul dan kitabNya.

Untuk itu, seyogyanya umat Islam mengkaji kembali tafsir dan ta'wi>l serta mendudukannya secara proporsional. Sehingga dalam melakukan pembacaan terhadap teks-teks agama (khususnya al-Qur'a>n) melahirkan “tafsir yang produktif” untuk menghadapi tantangan jaman global ini. Lebih jauh perlu adanya pemahaman tentang ta'wi>l secara proporsional sehingga kita tidak terjebak pada konflik yang tak produktif sebagaimana pengalaman masa lalu.

7. Fungsi ta'wi>l sebagai pendekatan al-Qur'a>n

Setelah memberikan pemaknaan terbatas dalam sisi bahasa dan istilah ta'wi>l, kemudian penambahan beberapa keterangan dan ulasan mengenai adanya syarat dan pra-syarat dalam melakukan ta'wi>l, maka menghadirkan ta'wi>l dalam posisi yang liberatif (membebaskan) dalam mendekati Al-Quran menjadi pilihan yang menarik.

Ta'wi>l dalam aplikasinya mempunyai pengertian yang lebih dibanding tafsir, ta'wi>l memiliki probabilitas ruang yang lebih lapang dibanding dengan tafsir dalam segi pemaknaannya. Hal ini dikarenakan ta'wi>l, sebagaimana terangkum dalam disparitasnya dengan tafsir, mengedepankan corak penggalian makna, kekuatan *dirayah*, serta kental dengan orientasi ijtihad dan *istinba>t*. Karakter itulah yang tidak didapati dalam tafsir. Sehingga ruang pemaknaan Al-Quran, dengan ta'wi>l sebagai pendekatannya menjadi lebih menarik dan memiliki probabilitas makna yang tinggi.

Karena memiliki tingkat probabilitas makna yang lebih luas, maka syarat dan pra-syarat ta'wi>l perlu dikemukakan. Hal ini, di samping untuk mengurangi kecerobohan dalam menggunakan ta'wi>l, juga untuk mewujudkan persesuaian antara penakwil dengan proses ta'wi>l yang tengah dilakukan. Di antara pra-syarat ta'wi>l adalah lafaz } mengandung makna ta'wi>l, makna dikenal oleh kalangan ahli yang otoritatif, serta makna dikenal dalam Arab klasik. Sementara di antara syarat penakwil adalah memiliki ketakwaan kepada Allah, kerendahan hati, zuhud, berorientasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta *mujahadah* (kemampuan mengolah jiwa melawan nafsunya).

Setelah itu, dalam menggunakan ta'wi>l sebagai pendekatan terhadap Al-Quran, pijakan pertama sebagai *starting point* akan selalu mempertautkan kebahasaan terlebih dahulu. Hal ini sebagai upaya awal untuk mengeksplorasi probabilitas makna yang terkandung, kemudian mendukung pilihan tersebut dengan dalil, serta dilakukan melalui sarana ijtihad dan *istinbat*. Karena kekhasan inilah ta'wi>l memiliki karakter “Kreatif, Intuitif, dan Subjektif. Dari Karakteristik inilah, menurut penulis pendekatan ta'wi>l akan memungkinkan hasil sesuatu yang berbeda antar penakwil dan dapat memberikan temuan baru yang sangat mungkin berbeda dengan saat pendekatan pemahaman al-Quran melalui tafsir dilakukan.

Oleh karena itu, pengedepanan toleransi dan kemauan untuk membuka diri dan berdialog dengan realita kemasyarakatan menjadi

ratusan abad yang lalu, dimana konstruksi sosial dan masyarakatnya berbeda dengan sekarang. Contoh, konsep fiqh mengenai perbudakan dan seseorang berupaya mengaplikasikan dalam kehidupan masa kini. sedang sistem perbudakan sudah tidak ada lagi; sudah “dihapus” dari muka bumi. Ini tentu akan membuat pikiran menjadi bingung,”Kenapa Islam “Membela” hukum perbudakan?” atau ‘Untuk apa belajar hukum perbudakan, wong budaknya sendiri sudah tidak ada?’” Akhirnya timbullah keruwatan-keruwetan pikiran yang berujung pada perasaan putus asa atau patah semangat. Kondisi seperti inilah yang disinyalir al-Qarrafi sebagai kontradiksi yang tak ada ujung pangkalnya.

Disamping itu, menurut Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani,¹²⁹ jika seseorang berkuat pada hukum-hukum yang sudah “jadi” dalam kitab-kitab fiqh konvensional, maka berapa waktu yang dibutuhkan, berapa lama

¹²⁹Nama lengkapnya Abu al-Faydl ‘Alam al-Din Muhammad Yasin Ibn Muhammad ‘Isa al-Fadani, beliau ulama keturunan Padang Sumatera Barat, lahir pada tahun 1335 H. bermadhab Sha’fi’i, karir intelektualnya beliau menjadi mufti di Makkah, pengembaraan keilmuannya dimulai dari menimba Ilmu dari ayahnya sendiri; Syaikh ‘Isa al-Fadani, kemudian kepada pamannya Syaikh Mahmud al-Fadan, kemudian dilanjutkan pada pendidikan formal di Madrasah Shawlithiyah (1346 H) dan terakhir di Dar al-Ulum al-Diniyyah, Makkah (tamat 1353 H). Disamping pendidikan formal beliau belajar ilmu kepada ulama mempunyai kompetensi dibidangnya masing-masing seperi; Syaikh ‘Umar Ba Junaid, mufti Sha’fi’iyah Makkah, lalu Syaikh a’id bin Muhammad al-Yamani, dan Syaikh Hasan al-Yamani. Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh, beliau berguru pada; Syaikh Muhsin bin ‘Ali al-Palimani al-Makki (ulama keturunan Palembang yang tinggal di Mekah), Sayyid ‘Alwi bin ‘Abbas al-Maliki al-Makki (ayah kandung Sayyid Muhammad ulama Sunni Kontemporer dari Arab Saudi) dan banyak ulama berpengaruh lainnya. Bahkan jumlah gurunya mencapai kisaran 700 orang (laki-laki maupun perempuan). Pengabdian beliau bertahun-tahun aktif sebagai mengajar dan dosen di Masjidil Haram dan di Dar al-Ulum al-Diniyyah, Makkah, terutama pada mata kuliah ilmu Hadis. Rutinitas setiap bulan Ramadhan beliau membaca (mabah. Jawa) dan mengijazahkan salah satu diantara Kutub al-Sittah (6 kitab utama Hadis) hal ini berlangsung selama ±15 tahun. Disamping mengajar beliau juga aktif menulis beberapa kitab hingga mencapai lebih dari 60 buah, diantaranya ‘*Al-Durr al-Mandlu*’d Syarh Sunan Abi Dawud (20 juz), ‘*Fath al-‘Allam*’ Syarh *Bulugh al-Maram* 4 jilid, ‘*Nayl al-Mamu’l ‘ala Lubb al-Ushul wa Gha’yah al-Wushul*, ‘*al-Fawa’id al-Janiyyah*’ dan masih banyak lagi, termasuk tulisannya tentang ilmu periwayatan hadis. Syaikh Yasin wafat pada hari Jum’at dini hari, 28 Dzu al-Hijjah 1410 H. Dan dimakamkan selepas shalat jumat di Pemakaman Ma’la Makkah. Untuk auto biografinya bisa dilihat pada *mukadimah al-Fawa’id al-Janiyyah*, (Beirut: Libanon, cet. I, 1997), 25

penguasaan kaidah-kaidah ushul oleh masyarakat non-Arab sering dihadapkan pada kendala bahasa. Ketidakhadiran berbahasa Arab bagi orang non-Arab akan menyulitkan dalam menyelami kandungan al-Quran dan Hadith. Padahal problematika yang dihadapi masyarakat terus berkembang, sementara dalam al-Quran dan Hadith—yang notabene berbahasa Arab—jawabannya belum tentu pernah disinggung secara langsung (sharih).

Kendala seperti diatas tidak akan ditemui bila mempelajari kaidah-kaidah fihiyyah (bukan ushuliyah). Sebab dalam kaidah fihiyyah tidak terdapat prasayat seketat syarat-syarat dalam kaidah ushuliyah, disamping penguasaan bahasa arab tidak menjadi patokan utama. Yang menjadi titik pijak dalam kaidah fihiyyah adalah upaya pemahaman atas prinsip-prinsip dasar syariat dan rumusan-rumusan hukum secara general. Selama upaya pemahaman itu terus berjalan, maka selama itu pula berkesempatan untuk menguasai kaidah-kaidah fihiyyah hasil kreasi ijtihad para salaf al-shalih tersebut.

3. Urgensi Kaidah Fiqh

Selain berguna untuk menghindari pemahaman yang kontradiktif, seperti telah disinggung pada awal tulisan ini, kaidah fiqh juga mengandung manfaat lain yang tak terhitung jumlahnya. Al-Suyuthi, misalnya, menyatakan bahwa dengan menguasai ilmu kaidah fiqh, maka kita akan mengetahui hakikat fiqh, dasar-dasar hukumnya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia terdalamnya. Selain itu, kita akan

perlu bersusah payah menghafal hukum-hukum *juz'iyah*, karena semuanya telah tercakup dalam kaidah-kaidah itu).

Sementara dalam catatan Abdurrahman bin Abdullah al-Sya'la>ni,¹³⁸ terdapat 6 (enam) keutamaan mempelajari kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Keenam hal tersebut adalah:

- a. Dengan bahasanya yang ringkas-padat, kaidah fiqh akan mudah dipelajari dan dihafalkan oleh siapapun untuk mengetahui hukum-hukum *furu'iyah* yang banyak jumlahnya. Bahasa yang ringkas-padat akan memudahkan kita untuk mengingatnya. Sebab, untuk benar-benar menguasai setiap permasalahan fiqh akan amat menyulitkan, dan biasanya hukum-hukum fiqh itu hanya mudah diingat ketika dibutuhkan atau sedang terjadi. Inilah yang dimaksud al-Zarkasyi dalam *maqalah*-Nya; “*fa inna dhabtha al-umur al-Muntasyirah al-muta'addidah fi al-qawanin al-muttahidah, huwa aw'a li hifdziha wa ad'a li dhabthiha*” (menguasai beragam persoalan yang sangat banyak dengan satu studi yang integral, akan lebih mudah dihafal dan dikuasai).¹³⁹
- b. Terlalu memforsir tenaga untuk menguasai hukum-hukum *furu'iyah* terkadang membuat pikiran kita terjerembab dalam kontradiksi hukum antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Kita sering merasa bingung, kenapa hukum A berbeda dengan hukum B, padahal

¹³⁸ Lihat kembali dalam *Dirasah wa Tahqiq Kitab al-Qawa'id*, I/37-38.

¹³⁹ Dikuti Abdurrahman bin Abdullah al-Sya'la>ni dari *al-Mantsar li al-Zarkasyi*, I/65, *ibid.*

bertolak belakang dengan lafal yang jatuh setelah *la>*; dan jika menggunakan *bal* atau *la>kin*, maka *maqs}u>r* 'alayhnya adalah lafal yang jatuh setelahnya.

d) Mendahulukan lafal yang seharusnya diakhirkan. Dalam hal ini *maqs}u>r* 'alayhnya adalah lafal yang didahulukan.

e) Menggunakan *d}ami>r fas}l marfu>* (*huwa* atau *hum*). Dalam hal ini *maqs}u>r* 'alayhnya adalah lafal setelah *d}ami>r* yang bersangkutan.¹⁵⁵

4) *al-Was}l* adalah menghubungkan satu kalimat kepada kalimat yang lain dengan huruf *at}f*, misalnya *waw*, contoh:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (٤٣)

Dalam ayat tersebut (QS. al-Baqarah, 2: 43), terdapat tiga kalimat yang dapat dikategorikan sebagai *kala>m Insha>*, yaitu *aqi>mu>*, *a>tu>* dan *irka'u> ma'a al-Ra>ki'i>n*. Ketiganya mempunyai kesesuaian makna satu sama lain, artinya perintah shalat dan zakat diperintahkan pada kalimat pertama dan kedua dan penegasan perintah jamaah diperintahkan pada kalimat yang ketiga, penegasan yang terakhir ini berkaitan erat dengan perintah yang pertama (shalat) yang ditunjang dengan ibadah social zakat, artinya nilai kesempurnaan ibadah itu hendaklah dilakuakn dengan berjamaah.

diambil dari teks yang tidak begitu jelas melalui ijtihad. Namun meskipun teks tersebut tidak begitu jelas. Ia tetap memberikan makna rasional yang sejalan dengan yang diperoleh melalui penelitian secara mendalam terhadap isyarat-isyarat tanda-tanda yang bisa diamati yang terdapat di dalamnya. Contohnya QS. Al Baqarah, 2:233 tentang kewajiban menafkahi para ibu, yang artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*.”. dalam nas} ini setidaknya ada empat makna yang dapat diambil, yaitu : 1) kewajiban ayah memberi nafkah kepada para ibu ; 2) nasab anak semata-mata dikaitkan kepada ayahnya ; 3) kewajiban ayah menafkahi anaknya ; 4) bagi seorang ayah, pada waktu sangat butuh, boleh mengambil apa yang butuhkan dari harta anaknya.

Dari empat makna itu, makna yang pertama adalah makna yang eksplisit elementer (*maqshu>d al-ashli*). Sedangkan makna yang kedua merupakan makna implisit sekunder-subsider,²³² makna ketiga juga termasuk makna implisit rasional yang sekunder yang diperoleh melalui penelitian yang mendalam terhadap tanda-tanda (*isyarah*) yang terdapat dalam nas}. Tanda-tanda tersebut adalah

²³²Dalam literature madhab Hana>fiyah terjadi kontradiksi. Satu versi menggolongkan makna kedua tersebut pada makna implisit sekunder-subsider. Sedangkan versi lain menggolongkannya pada makna implisit elementer berdasarkan pemakaian kata ganti (*dhamir*) ‘lahu’ dalam redaksi wa’ala al-maulu>d, yang berarti terdapat penyandaran anak (*walad*) pada ayah (*wa>lid*). Oleh sebab itu nasab atau identitas hanya dikaitkan pada ayahnya. Lihat abd al-Karim Zaydan, *al-Waji>z fi> Ushu>l*, 257, dan juga keterangan Ibn Amir haj, *Taqri>r wa al-Tahbi>r fi fiqh sharh al-Tahri>r* (Baerut: da>al-Kutub al-‘ilmiyyah, tt), vol I, 107-110

8	Berkaitan dengan makna eksternal teks, seperti ilmu-ilmu bahasa	Berbasis pada ilmu Tafsir
---	-----------------------------------------------------------------	---------------------------

Dalam melakukan ijtihad sebagai produk hukum Islam yang merujuk terhadap teks (*nas} al-Qur'a>n*) hendaknya umat Islam mengembangkan ta'wi>l sebagai upaya mengembangkan tafsir dalam tradisi Islam. Kelebihan ta'wi>l adalah ia meniscayakan pelacakan akar (*al-'awdah ila al-asl*) dan pencapaian maksud (*ittijah al-ghâyah*).

Jika seorang penafsir hanya berhenti pada proses penukilan (*naql*) dan periwayatan (*riwayah*), maka seorang *mu'awwil* mencoba mencari kesimpulan yang bersifat kontekstual. Selain itu ta'wi>l juga membutuhkan intervensi nalar (*istinbat / Ijtihad*) dalam mencari makna. Dari hasil penakwilan diharapkan dapat menghasilkan dua hal: (1) makna (*al-ma'na*) yaitu makna bahasa yang dikandung dalam teks (*nas} alQur'an*). (2) Signifikansi (*al-maghya*), yakni makna kontekstual. Dengan mengembangkan ta'wi>l diharapkan umat Islam akan mampu melakukan pembacaan terhadap teks (*nas} al-Qur'a>n*) secara produktif, sehingga mampu menjawab problemaproblema hukum Islam yang dihadapi umat Islam, yang tak terbatas ruang dan waktu.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir secara epistemologi dipakai untuk penjelasan, pengungkapan hal-hal tersembunyi atau samar-samar yang *hissi*, sebagaimana juga dipakai untuk penjelasan yang bersifat *ma'âni*. Dan dalam hal ini yang bersifat *ma'âni* pemakaiannya lebih banyak

Sedangkan ta'wil adalah kata benda infinitif dari kata kerja transitif, *awwala*, yang berarti membuat sesuatu itu kembali atau mengurangi sesuatu, yang berarti “menemukan, mendeteksi, mengungkapkan, mengembangkan,

atau membuka, atau menjelaskan, menggambarkan, atau menterjemahkan tentang sesuatu atau mungkin mengurangnya atau tentang sesuatu yang terjadi atau mungkin terjadi.” Istilah ta’wil, menunjukkan arti penterjemahan sesuatu yang simbolik (seperti mimpi) atau penuturan hasil akhir atau hasil yang terjadi sesudahnya, dan ia dapat juga berarti akibat terakhir (*'aqibah*) dari sesuatu yang telah terjadi.

Al-Qur’a>n diturunkan untuk dipahami. Sedangkan penghayatan serta pemahaman tidak mungkin akan bisa dilaksanakan melainkan jika si pembaca menjelaskan maksud pembicaraannya (tafsir dan ta’wil). Adapun apabila seseorang berbicara dengan lafaz}-lafaz} yang mengandung banyak makna, lalu dia menjelaskan maksudnya, tentu pembicaraannya bisa dipahami dan dihayati, khususnya dalam menentukan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perempuan butuh suami dan laki-laki lebih membutuhkan isteri, maka suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa dari data statistik yang ada diberbagai negara jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, dan lebih banyak laki-laki meninggal dari pada wanita,⁴

Melihat fenomena di atas, poligami masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya praktik poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontra-produktif ditengah masyarakat,. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.⁵

Ketika memahami poligami perspektif konsep yang ditawarkan oleh al-Qur'a>n, maka tidak ada kata kunci yang pas untuk bisa merepresentasikan permasalahan poligami. Hanya dalam beberapa kitab tafsir disebutkan dan mengkategorikan poligami pada bab '*ta'adud al-zauja>t*' yang berarti "berbilangannya istri". Sedangkan untuk membahas konsep pernikahan secara umum, sebagaimana disebut dalam *S}afwah al-Baya>n li Ma'a>ni> al-Qur'a>n*, ada sekitar 19 ayat al-Qur'a>n yang menjelaskan seluk beluk konsep pernikahan yang ditawarkan oleh Islam. Sedangkan yang secara spesifik membahas tentang poligami, pada tiga ayat al-Qur'a>n, yaitu pada surat al-Nisa>' (4) ayat 3, 23, dan 129.

⁴ Musfis Aj-Jahrani, *Nas}ratun fi< Ta'addudi az-Zawja>t* diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul: "*Poligami dari Berbagai Persepsi*" Cet.I; (Jakarta: Gema Insani, 1996).

⁵Kebutuhan seksual yang lebih tinggi serta mengikuti sunnah Rasulullah saw. Olehnya itu salah satu upaya untuk mengatatasi hal tersebut adalah dengan jalan laki-laki kawin lebih dari satu (poligami).

berbeda. Syarat adil dalam poligami, memiliki sisi yang unik, karena berada dalam perbuatan dan rukun pernikahan, sebagaimana halnya maskawin. Maskawin merupakan syarat, tetapi berada di dalam dan berdampingan dengan rukun, tetapi bukan rukun. Oleh sebab itu, karena syarat adil poligami memang seperti itu, dan adil tidaknya seorang suami kepada isteri-isterinya hanya dapat dibuktikan setelah poligami berlangsung, maka hukum poligami, dengan menempatkan syarat adil adalah sebuah perilaku yang dibangun berdasarkan prosedur al-Qur'a>n, maka apresiasi dari keadilan itu menjadi sebuah keniscayaan (kewajiban) yang harus dibuktikan keberadaannya dengan komitmen jiwa dan moral tinggi ketika melangsungkan berpoligami.⁵³

Masih berkaitan dengan adil sebagai syarat dalam poligami, bahwa secara garis besar, adil meliputi dua hal yaitu adil dalam menggauli dan adil dalam hal memberikan keperluan hidup. Meski syarat adil yang dimaksudkan hanya sebatas pada hal-hal yang mungkin dapat dilakukan dan dikontrol manusia, keadilan pada tingkat kualitatif tetap tidak akan

⁵³ Menurut penulis, karakter manusia seperti ini, sungguh sulit ditemui, terlebih di zaman seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, hukum poligami pada paradigma ini, adalah sunnah bila memang ketentuan-ketentuannya bisa dijalankan sebagaimana Rasulullah SAW menjalankan taaddud al-Zawja>t, beliau sangat adil dan memang yang dilakukannya murni bertujuan untuk *Tashri'islam* (pengajaran dan penyebaran) agama Islam bukan semata-mata menuruti hawa nafsu, kendatipun demikian, Rasulullah pernah memohon dispensasi kepada Allah tentang keadilan yang bersifat immateri (cinta, kasih sayang) agar Ia tidak dituntut kalau tidak bisa berbuat adil dalam hal tersebut, hal ini sebagaimana diceritakan isteri 'Aisah Ra."Rasulullah adalah orang yang sangat adil dalam membagi waktu untuk isteri-isterinya Ia berdo'a kepada Allah, Ya Allah Aku sudah berbuat adil dalam membagi waktuku untuk isteri-isteriKu, (inilah kemampuanku) dan jangan Engkau hukum Aku terhadap apa yang Aku tidak mampu membagi keadilan itu (hati)". bahkan ancaman bagi orang laki-laki yang tidak bisa berbuat adil di antara isteri-isterinya (condong kepada salah satunya) kelak di hari kiamat badannya miring sebelah tetapi harus memenuhi syarat yaitu adil.

wanita tidak bisa dimanfaatkan tanpa barter wajib (mahar) baik disebut waktu akad atau tidak)

Struktur lafaz{ (*iltizam* dan *munawalah*) ditinjau dalam konteks *mahar mithil* dengan meneliti kedua lafaz{ ini mengandung implikasi hukum bahwa “ kalau mahar itu diwajibkan atas laki-laki sebagai pemberian yang ikhlas dan wajib dengan tanpa imbalan, maka pihak perempuan juga dituntut keikhlasannya menyerahkan dirinya apabila mahar telah dibayar”. Inilah implementasi penerapan hukum dari statemen ulama: Bahwa apabila suatu yang tidak disebutkan dalam teks (*masqud ‘anhu*) itu lebih utama dari suatu yang disebutkan dalam teks *mantuq-bihi*, maka ini adalah termasuk *dalalah an-nas*} dalam arti bahwa menyamakan suatu yang tidak disebutkan dalam teks terhadap suatu yang disebutkan dalam teks ini semata-mata melalui pemahaman petunjuk intrinsik bahasa yang bisa digali dari petunjuk lafaz (leksikal meaning){, bukan hasil penalaran. ‘illat yang menjadi titik temu keduanya disimpulkan dari teks bahasa secara meyakinkan. Dan apabila ‘illat hukum yang menghubungkan *maskut-‘anhu* dan *mantuq-bihi* tersebut, dapat disimpulkan dari kontek bahasa secara jelas, dan *qoth’i* maka tidak menimbulkan perbedaan pendapat dalam masalah *furu’*. Hasil penetapan hukum *furu’* yang disepakati tersebut lebih disebabkan karena kejelasan ‘illat yang ada dalam *mantuq-bihi* dalam

dan *mahkum bihi* yang diambil dari *dalalah lafaz*{-nya yaitu makna *Munawalah* dari sinonim lafaz{ اتوا yaitu kerelaan perempuan dalam menerima mahar .

- 3) Dalam metodologi istinbat} hukum terwujudnya sebuah hukum dan tidak adanya hukum dilihat dari adanya illat (ratio legis) atau konteks yang melatarbelakanginya, dengan mengacu ada kaidah diatas, tinjauan penulis dari segi kekuatan 'illat yang menghubungkan kerelaan wanita sebagai *masku>t-'anhu* dan lafad Nih}lah sebagi *mant}u>q-bihi* dengan melihat 'illat hukum yang dipahami dari kontek bahasa bisa menjadi landasan bagi penetapan hukum mahar *mithil*.

